



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS AIRLANGGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAN YULIE REINDRAWATI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 875390

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.771.263.223**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.723.870.223
2. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/178 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/79 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 1.431 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 147.393.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **641.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 541.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **130.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **25.967.499**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.568.230.722

III. HUTANG

Rp. 805.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.763.230.722

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.